

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan memiliki peran yang penting dalam kemajuan dan pembangunan suatu bangsa. Pendidikan juga merupakan hak bagi semua anak yang artinya setiap anak mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, tanpa terkecuali. Baik yang berkebutuhan khusus (tunanetra, tunarungu, tunagrahita ringan, autisme, lambat belajar dan tunalaras), anak-anak berkecerdasan istimewa, anak-anak yang termarginalkan karena kurang beruntung dan tidak mampu dari segi ekonomi maupun anak-anak normal. Pendidikan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi setiap manusia, tidak terkecuali bagi anak luar biasa atau anak berkebutuhan khusus.

Anak-anak normal cenderung punya kemampuan homogen sehingga mereka mampu belajar pada kelas reguler, sedangkan anak-anak berkebutuhan khusus perlu sebuah desain pendidikan khusus yang dapat mengakomodir kebutuhannya sehingga potensi mereka bisa dikembangkan secara optimal. Peran pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan merata tentu sangat berpengaruh dan penting dalam pengembangan pendidikan. Selama ini anak

berkebutuhan khusus disediakan fasilitas pendidikan khusus yang disesuaikan dengan derajat dan jenis kekhususannya yang disebut dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Namun, Sekolah Luar Biasa (SLB) masih menjadi tembok pemisah bagi anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak pada umumnya, hal ini menghambat proses interaksi diantara mereka. Akibatnya anak berkebutuhan khusus menjadi kelompok yang tersingkirkan dalam interaksi sosialnya di masyarakat. Masyarakat menjadi tidak akrab dengan anak berkebutuhan khusus, dan begitupun sebaliknya, anak berkebutuhan khusus merasa bukan bagian dari kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Dalam menanggulangi hal tersebut, maka perlu dilakukan suatu terobosan berupa pemberian kesempatan dan peluang kepada anak-anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan di sekolah umum. Pemerintah Indonesia dalam mengakomodasi hal tersebut membuat kebijakan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang dijabarkan dalam UU Sisdiknas nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 32 yang mengatur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Implementasinya dijabarkan melalui Permendiknas nomor 70 tahun 2009 yaitu dengan memberikan kesempatan dan peluang kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan di sekolah regular (Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas/ kejuruan) terdekat. Inilah yang disebut dengan Pendidikan Inklusif (Kustawan, 2013:19).

Pendidikan inklusi mulai dicanangkan pada Konferensi Internasional yang diselenggarakan oleh UNESCO pada tanggal 7-10 Juni tahun 1994 di Salamanca

Spain. Konferensi yang diikuti oleh 92 negara dan 25 organisasi internasional ini menghasilkan kesepakatan yang dikenal dengan Kesepakatan Salamanca (*Salamanca Statement*) yang menyepakati pentingnya pelaksanaan pendidikan inklusi oleh semua Negara di dunia, sehingga setiap sekolah dapat melayani semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus (Smith, 2012:19).

Sejalan dengan perkembangan layanan pendidikan inklusi, Sekolah inklusi merupakan salah satu bentuk pemerataan dan bentuk perwujudan pendidikan tanpa diskriminasi dimana anak berkebutuhan khusus dan anak-anak pada umumnya dapat memperoleh pendidikan yang sama. Dalam pendidikan inklusi anak berkebutuhan khusus tidak mendapat perlakuan khusus maupun hak-hak istimewa, melainkan persamaan hak dan kewajiban yang sama dengan peserta didik lainnya. Kerjasama dari berbagai pihak baik itu pemerintah, pihak sekolah, dan masyarakat. Dengan pelaksanaan sekolah inklusi diharapkan mampu menciptakan generasi penerus yang dapat memahami dan menerima segala bentuk perbedaan dan tidak menciptakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat kedepannya.

Di Indonesia sendiri pendidikan inklusi sudah dijalankan. Beberapa sekolah sudah menerapkan pembelajaran inklusi, salah satunya SD Kreatif Muhammadiyah 16 Surabaya. SD Kreatif memiliki karakteristik sendiri yang membedakan dengan sekolah inklusif lainnya, dimana SD Kreatif memiliki program individual untuk anak inklusif yang dinamakan dengan ruang sumber, hal ini yang membuat peneliti ingin melakukan penelitian di SD tersebut. SD Kreatif Muhammadiyah 16 Surabaya mengakui bahwa setiap individu memiliki keunikan sendiri, sehingga ia mempunyai kemampuan untuk berkembang menjadi dirinya sendiri dan menggapai

prestasinya sendiri. SD Kreatif Muhammadiyah 16 Surabaya melaksanakan pembelajaran yang berbeda dengan dengan sekolah regular lainnya, karena menampung dan menerima peserta didik ABK. Dalam penanganan peserta didik ABK, SD Kreatif melakukan berbagai inovasi agar peserta didik ABK dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Hal ini juga dilakukan untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat bahwa peserta didik ABK juga dapat bersekolah di sekolah umum bukan hanya di sekolah khusus seperti Sekolah Luar Biasa (SLB).

Pembelajaran untuk Anak Berkebutuhan Khusus membutuhkan strategi tersendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Model pembelajaran terhadap peserta didik berkebutuhan khusus yang dipersiapkan oleh guru di sekolah, ditujukan agar peserta didik mampu berinteraksi terhadap lingkungan sosial. Pembelajaran tersebut disusun secara khusus melalui penggalian kemampuan peserta didik. Dalam penerapannya pembelajaran inklusi memerlukan modifikasi kurikulum untuk disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik (ABK). Modifikasi kurikulum tidak lepas dari tiga aspek utama pembelajaran, yakni perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. Kurikulum yang digunakan pada pendidikan inklusif adalah kurikulum yang fleksibel, disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi pendidikan inklusif di SD Muhammadiyah 16 Surabaya khususnya di pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan, seperti metode, model maupun media yang digunakan serta dapat mengetahui faktor pendukung

maupun faktor penghambat dalam proses penyelenggaraan pendidikan beserta upaya guru maupun sekolah dalam menangani hal tersebut.

Selain itu ada tiga penelitian relevan yang mendasari penelitian ini yaitu pertama yang dilakukan oleh Rona Fitria (2012) hasil penelitian mengenai pembelajaran dalam setting inklusi di SDN 18 Kota Luar kecamatan Pauh Padang bahwa rancangan berbentuk RRP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) dan PPI (Program Pembelajaran Individul) harus disesuaikan dengan kebutuhan, dalam pelaksanaan pembelajaran terdapat beberapa kendala diantaranya banyaknya jumlah siswa dan adanya anak berkebutuhan khusus menyebabkan metode yang digunakan dalam proses pembelajaran belum bervariasi, penanganan anak *hyperaktif* sulit meredam emosi saat mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas, pengaturan tempat duduk. Usaha yang dilakukan dalam mengatasi masalah adalah meminta bantuan orang tua maupun guru pembimbing khusus untuk meredam emosi anak *hyperaktif*, metode dan media yang digunakan disesuaikan dengan materi pembelajaran, melakukan penyederhanaan materi, dan guru melakukan pertukaran tempat duduk siswa agar lebih bervariasi.

Penelitian juga dilakukan oleh Ery Wati (2014) hasil penelitian menunjukkan dalam implementasi program pendidikan inklusi di SD Negeri 32 Kota Banda Aceh, kepala sekolah telah mengupayakan pelaksanaan program yang telah disusun. Pengawasan juga dilakukan oleh kepala sekolah untuk mengetahui sejauh mana program pendidikan inklusi ini berjalan dalam kelas (kurikulum, sarana dan prasarana pembelajaran dan guru pendamping khusus) serta untuk memberikan penilaian baik yang telah tercapai maupun yang belum tercapai. Pada

hasil penelitian ini secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusi di SD Negeri 32 kota Banda aceh telah berjalan baik, namu ada beberpa hambatan dalam pelaksanaannya meliputi pembiayaan pendidikan, sarana serta kurangnya guru pendamping khusus.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Rindi Lelly Anggraini (2014), dengan hasil penelitian yaitu menunjukkan bahwa proses pembelajaran inklusi di kelas V SD Negeri Giwangan dengan menyatukan peserta didik normal dengan peserta didik berkebutuhan khusus (kelas penuh) di bawah pengawasan guru kelas atau guru mata pelajaran dan guru pendamping khusus. Faktor pendukung proses pembelajaran inklusi adalah sarana dan prasarana yang cukup memadai, adanya dukungan dari Direktorat PLB. Faktor penghambat proses pembelajaran inklusi guru pelajaran tidak membuat administrasi kelas dan kurangnya tenaga pendidik bagi peserta ABK di sekolah.

Berdasarkan berbagai hal inilah, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan proses pembelajaran peserta didik ABK di SD Kreatif Muhammadiyah 16 Surabaya serta faktor pendukung dan penghambat dalam pendidikan inklusif. Dan terkait dengan hal di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui dan mengkaji tentang **“IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF (STUDI DESKRIPTIF DI SD KREATIF MUHAMMADIYAH 16 SURABYA)”**

1.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dijelaskan, maka permasalahan yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana implementasi pendidikan inklusif yang dilakukan di SD Kreatif Muhammadiyah 16 Surabaya ?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses pendidikan inklusif di SD Kreatif Muhammadiyah 16 Surabaya ?
3. Bagaimana upaya guru dan sekolah untuk mengatasi faktor penghambat dan mempertahankan faktor pendukung proses pendidikan inklusif di SD Kreatif Muhammadiyah 16 Surabaya ?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi pendidikan inklusif di SD Kreatif Muhammadiyah 16 Surabaya .
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses pendidikan inklusif di SD Kreatif Muhammadiyah 16 Surabaya.
3. Untuk mengetahui upaya guru dan sekolah dalam mengatasi faktor penghambat dan mempertahankan atau meningkatkan faktor pendukung proses pendidikan inklusif di SD Kreatif Muhammadiyah 16 Surabaya

1.4 Manfaat

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dapat mengetahui implementasi pendidikan inklusif di SD Kreatif Muhammadiyah 16 Surabaya serta dapat diketahui faktor pendukung maupun faktor penghambat dalam proses pembelajaran. Peneliti berharap akan adanya peningkatan terhadap mutu pelaksanaan pembelajaran inklusi di sekolah tersebut.

1.4.2 Secara Praktis

a. Sekolah

Sebagai masukan dan bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan sekolah berkaitan dengan pendidikan inklusi serta dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

b. Guru

Sebagai sumber informasi dan referensi serta dapat menjadi motivasi dalam pengembangan proses kegiatan pembelajaran di kelas terutama dengan proses pembelajaran inklusi.

c. Peneliti

Sebagai rujukan dan sarana menambah wawasan mengenai proses pendidikan inklusi dalam proses pembelajaran.

1.5 Asumsi

Adapun asumsi yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberikan kesempatan hak belajar yang sama antara peserta didik disabilitas atau berkebutuhan khusus dan non disabilitas di dalam satu lembaga formal. Pendidikan pada sekolah inklusif menekankan pada keterpaduan penuh, menghilangkan keterbatasan dengan menggunakan prinsip *education for all*. Pembelajaran anak berkebutuhan khusus (*student with special needs*) membutuhkan suatu strategi tersendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pembelajaran terhadap peserta didik berkebutuhan khusus yang dipersiapkan oleh guru di sekolah, ditujukan agar peserta didik mampu berinteraksi terhadap lingkungan sosial. Pembelajaran tersebut disusun secara khusus melalui penggalian kemampuan diri peserta didik yang didasarkan pada kurikulum yang telah disesuaikan.

SD Kreatif Muhammadiyah 16 Surabaya merupakan salah satu pelaksana program inklusif. Sekolah ini telah memenuhi beberapa kriteria dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, diantaranya terdapat anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah, pihak sekolah telah memperoleh sosialisasi tentang pendidikan inklusif. Dalam penerimaan peserta didik sekolah ini tidak memiliki kualifikasi tertentu, tetapi berdasarkan kuota khusus. Di tiap kelas terdapat maksimal tiga anak berkebutuhan khusus dengan didampingi guru pendamping khusus (GPK).

Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif terdapat beberapa aspek diantaranya peserta didik. Peserta didik pada sekolah penyelenggara pendidikan

inklusif adalah semua anak tanpa membedakan kondisi fisik, psikologis, emosi, potensi kecerdasan serta kondisi sosio geografi maupun ekonomi yang berpotensi menghambat pembelajaran. Pada penerapan pendidikan inklusif terdapat dua macam peserta didik yaitu peserta didik normal dan peserta didik berkebutuhan khusus. Peserta didik normal ialah siswa yang bersekolah di suatu lembaga dengan tanpa memiliki kelainan atau kekurangan apapun, sementara peserta didik khusus ialah siswa yang memiliki kekurangan atau kelainan secara fisik maupun mental.

Setiap peserta didik memiliki kebutuhan yang berbeda, baik karena faktor yang bersifat permanen seperti hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, hambatan fisik, ataupun yang tidak permanen seperti, masalah sosial, bencana alam, dan lain-lain. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi dan assesmen dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Identifikasi dimaknai sebagai proses penjangkaran untuk menentukan jenis kebutuhan khusus peserta didik, sedangkan assesment merupakan proses untuk menemukenali kondisi peserta didik yang menyangkut aspek potensi, kompetensi maupun karakteristik peserta didik dalam kerangka penentuan program pendidikan dan atau intervensi untuk mengembangkan semua potensi yang dimilikinya. Secara khusus asesmen ini juga dimaksudkan untuk memahami keunggulan dan hambatan belajar siswa, sehingga diharapkan program yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan belajarnya. Penting bagi guru memiliki kemampuan mengidentifikasi peserta didik atau calon peserta didik untuk mengetahui ada tidaknya anak berkebutuhan khusus yang perlu mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan

kebutuhannya. Tujuannya agar dapat memberikan pelayanan dan bantuannya dengan tepat.

Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pada dasarnya menggunakan kurikulum yang berlaku di sekolah umum. Namun bagi anak berkebutuhan khusus, kurikulumnya perlu disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, karena hambatan dan kemampuan yang dimilikinya bervariasi. Hal ini berarti bahwa kurikulum yang digunakan harus merupakan kurikulum yang fleksibel yang dapat dengan mudah disesuaikan dengan kebutuhan anak. Penyesuaian (penyelarasan) kurikulum dilakukan oleh tim pengembang kurikulum di sekolah. Tim pengembang kurikulum di sekolah terdiri dari: kepala sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran, guru pembimbing khusus, konselor, psikolog, komite sekolah dan ahli lain yang terkait.

Secara operasional model kurikulum yang digunakan ada 3 (tiga) jenis, yaitu: (1) kurikulum umum (reguler), untuk siswa biasa dan anak berkebutuhan khusus yang dapat mengikuti kurikulum umum; (2) kurikulum modifikasi, yaitu perpaduan antara kurikulum umum dengan kurikulum PPI, untuk anak berkebutuhan khusus yang tidak dapat mengikuti kurikulum umum secara penuh; dan (3) Kurikulum yang diindividualisasikan untuk anak berkebutuhan khusus yang sama sekali tidak dapat mengikuti kurikulum umum.

Aspek lain yang menunjang dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif ialah sarana prasarana, pada hakekatnya semua sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan tertentu itu dapat dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, tetapi untuk mengoptimalkan proses pembelajaran perlu

dilengkapi aksesibilitas bagi kelancaran mobilisasi anak berkebutuhan khusus, serta media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Sarana prasarana ini meliputi, gedung dan atau bangunan, media pembelajaran dan lingkungan belajar di sekolah yang mudah diakses (memenuhi prinsip aksesibilitas) peserta didik yang membutuhkan pendidikan khusus. Pengadaan sarana dan prasarana ini tentunya disesuaikan dengan tiap-tiap jenis kelainan anak berkebutuhan khusus.

Dalam pendidikan inklusif pendidik dan tenaga pendidikan sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Pendidik dalam pendidikan inklusif diantaranya adalah (a) Guru Kelas, adalah guru yang mengikuti kelas pada satuan pendidikan sekolah dasar atau yang sederajat, yang bertugas melaksanakan pembelajaran seluruh mata pelajaran pada satuan pendidikan tersebut, kecuali pendidikan agama dan olahraga. Tugas guru kelas antara lain ialah menciptakan iklim belajar yang kondusif, menyusun dan melaksanakan asesmen, menyusun program pembelajaran dengan kurikulum modifikasi bersama dengan guru pembimbing khusus. (b) Guru Mata Pelajaran, adalah guru yang bertanggung jawab melaksanakan pembelajaran untuk mata pelajaran tertentu pada satuan pendidikan. Tugas guru mata pelajaran diantaranya ialah menciptakan iklim belajar yang kondusif, menyusun dan melaksanakan asesmen, menyusun program pembelajaran dengan kurikulum modifikasi bersama dengan guru pembimbing khusus. (c) Guru Pendamping Khusus, adalah guru yang berkualifikasi sarjana (S1) pendidikan luar biasa (*ortopedagog*), atau sesuai dengan syarat pada sekolah itu sendiri yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pendamping dan bekerja sama

dengan guru kelas atau guru bidang studi dalam memberikan assesmen, menyusun program pengajaran individual.

Selain itu GPK bertugas memberikan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus pada sekolah inklusif. Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, maka GPK haruslah berlatar belakang pendidikan khusus atau guru reguler yang telah mendapatkan pelatihan yang memadai tentang layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. (d) Guru bimbingan penyuluhan, adalah guru yang bertanggung jawab untuk mencari solusi bagi semua peserta didik pada sekolah inklusif yang mengalami kesulitan dalam belajar, sosialisasi, perilaku sosial, dan emosi dan etika sosial sesuai dengan irama perkembangan anak.

Selain tenaga pendidik terdapat peran penting juga oleh komite sekolah dalam pelaksanaan pendidikan inklusi. Komite sekolah juga berperan dalam Komite Sekolah adalah suatu lembaga mandiri non-profit dan non-politis yang mewadahi peran serta masyarakat sebagai mitra sekolah, yang dibentuk berdasarkan musyawarah oleh para *stake-holder* pendidikan pada tingkat satuan pendidikan tertentu yang merepresentasikan dari berbagai unsure masyarakat. Peran utama komite sekolah adalah untuk meningkatkan mutu pemerataan dan efensiensi dalam pengelolaan pendidikan, baik pada satuan pendidikan pra-sekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah.

Proses pembelajaran inklusi di SD Kreatif Muhammadiyah 16 Surabaya dengan menyatukan peserta didik normal dan dengan peserta didik khusus. Secara garis besar pembelajaran yang dilakukan pada pendidikan inklusif sama dengan pendidikan pada sekolah reguler pada umumnya, hanya saja saat proses

pembelajaran peserta didik khusus di bawah pengawasan guru kelas dan guru pendamping khusus. Metode dan media yang digunakan dalam pembelajaran juga menyesuaikan kebutuhan peserta didik. Penilaian dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif sendiri juga menyesuaikan kebutuhan peserta didik, dimana dalam penilaian guru pendamping dan guru kelas menyesuaikan kemampuan tiap anak.

Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan inklusi, perlu dialokasikan dana khusus, yang antara lain untuk keperluan: (1) Kegiatan identifikasi input siswa, (2) Modifikasi kurikulum, (3) Insentif bagi tenaga kependidikan yang terlibat, (4) Pengadaan sarana-prasarana, (5) Pemberdayaan peranserta masyarakat, dan (6) Pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar. Untuk penyelenggaraan program selanjutnya, diusahakan agar sekolah bersama-sama orang tua siswa dan masyarakat (Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah), serta pemerintah daerah dapat menanggulangnya.

Dalam rangka optimalisasi sumber daya masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan inklusif, diperlukan peran serta masyarakat, dapat berbentuk peran langsung, seperti bantuan tenaga keahlian, dukungan pembiayaan, dukungan sarana prasarana, penyaluran lulusan, keterlibatan dalam tim pengelola dan dapat berbentuk peran tidak langsung, seperti bantuan pemikiran untuk pengambilan kebijakan, bantuan akses dan jaringan, pengembangan kurikulum, dan pengawasan. Masyarakat di sekitar SD Kreatif Muhammadiyah 16 Surabaya sangat berperan aktif dalam membantu penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah tersebut.

Faktor pendukung proses pembelajaran adalah sarana dan prasarana yang memadai, guru membuat program khusus, adanya dukungan dan peran dari orang tua dalam kemajuan kemampuan peserta didik ABK. Faktor penghambat proses pembelajaran inklusi yaitu guru kurang memahami kebutuhan khusus dan keberagaman dari peserta didik ABK misalnya dalam penanganan anak berkebutuhan khusus yang sulit meredam emosi saat mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas, kurangnya tenaga pendidik bagi peserta ABK.

Untuk mengatasi beberapa faktor penghambat penyelenggaraan pendidikan inklusif guru dan sekolah melakukan beberapa upaya, dari guru sendiri melakukan beberapa upaya seperti meminta bantuan orang tua maupun GPK untuk meredam emosi anak berkebutuhan khusus (ABK), untuk upaya yang dilakukan sekolah dengan menyediakan guru pendamping yang berkompeten. Sedangkan untuk mempertahankan faktor pendukung pihak sekolah melakukan pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk mengetahui sejauh mana program pendidikan inklusi ini berjalan dalam kelas serta selalu *update* mengenai pendidikan agar tetap mengikuti perkembangan tetapi juga menyesuaikan kebutuhan anak berkebutuhan khusus sendiri.

(HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN)